



# RENCANA STRATEGIS LLDIKTI WILAYAH IX TAHUN 2020 - 2024

REVISI-1



Jl. Bung KM 9 Tamalanrea  
Makassar



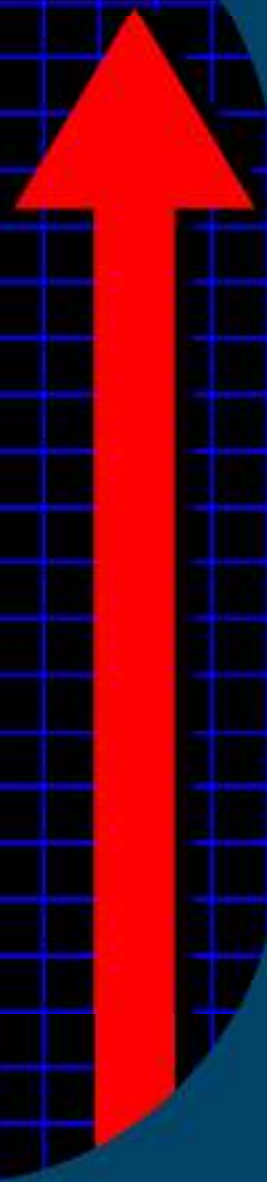
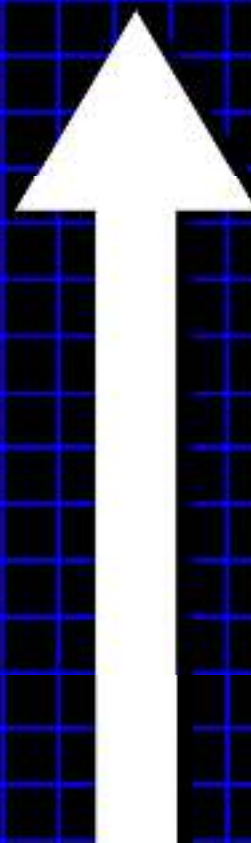
0411 - 586201/586202



<https://lldikti9.kemdikbud.go.id>



[lldikti9@kemdikbud.go.id](mailto:lldikti9@kemdikbud.go.id)



## Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan karuniaNya Rencana Strategis (RENSTRA) Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX Tahun 2020-2024 telah selesai disusun. Renstra LLDIKTI Wilayah IX disusun berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 34 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.

Pelaksanaan penyesuaian Renstra disesuaikan dengan perubahan kebijakan Permendikbud nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) PTN dan LLDIKTI dan Permendikbudristek nomor 35 tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi serta Permendikbudristek nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tahun 2020-2024.

LLDIKTI Wilayah IX sebagai satuan kerja (satker) di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi wajib mengimplementasi semua tujuan dan sasaran tingkat Kementerian sesuai dengan tugas dan fungsinya serta kewenangan yang dimiliki.

Rencana strategis LLDIKTI Wilayah IX Tahun 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan dan strategi kebijakan, program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun mendatang. Renstra LLDIKTI Wilayah IX menjadi pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap semua kebijakan, program dan kegiatan LLDIKTI Wilayah IX dalam kurun waktu 2020-2024 dengan terus mengembangkan penyelenggara manajemen yang profesional dan bermartabat sebagai wujud komitmen LLDIKTI Wilayah IX untuk selalu memperbaiki kualitas pelayanan kepada pemangku kepentingan.

Renstra LLDIKTI Wilayah IX Tahun 2020-2024 merupakan acuan bagi setiap fungsi yang ada di LLDIKTI Wilayah IX dalam menjalankan tanggungjawabnya. Mengingat hal tersebut, maka semua yang tertuang pada renstra ini harus dilaksanakan secara akuntabel dan selalu berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance). Untuk menjamin keberhasilan

pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian yang ditargetkan, maka akan dilakukan evaluasi setiap tahun. Apabila diperlukan dan dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator- indikator kerjanya.

Renstra ini penting untuk dipahami serta dimanfaatkan oleh seluruh jajaran LLDIKTI Wilayah IX dan para pemangku kepentingan dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, pengendalian program dan kegiatan pembangunan bidang pendidikan secara efektif, efisien, terintegrasi, sinergis dan berkesinambungan.

Penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan penyelarasan Renstra LLDIKTI Wilayah IX periode tahun 2020-2024. Demikian penyelarasan Rencana Strategis (RENSTRA) Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX Tahun 2020-2024 ini disusun, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karuniaNya untuk kelancaran serta keberhasilan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX dalam memberikan layanan terbaik untuk mewujudkan visi dan misinya.



Makassar, 7 Juli 2022

Kepala,

Drs. Andi Lukman, M. Si  
NIP. 196708171993031001

**Daftar Isi**

Kata Pengantar	ii	
Daftar Isi	iv	
Daftar Tabel	v	
Daftar Gambar	vi	
Daftar Istilah	vii	
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
	1.1. Kondisi Umum	1
	1.2. Permasalahan yang masih Dihadapi dan Potensi	18
	1.3. Tantangan Renstra Periode 2020-2024	20
<b>BAB II</b>	<b>Visi, Misi Tujuan dan Sasaran</b>	<b>26</b>
	2.1. Visi	21
	2.2. Misi	27
	2.3. Tata Nilai	28
	2.4. Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan	32
	2.5. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran	34
<b>BAB III</b>	<b>Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan</b>	<b>36</b>
	3.1. Arah Kebijakan dan Strategi	36
	3.2. Kerangka Regulasi	38
	3.3. Kerangka Kelembagaan	40
	3.4. Reformasi Birokrasi	44
<b>BAB IV</b>	<b>Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan</b>	<b>46</b>
	4.1. Target Kinerja	46
	4.2. Kerangka Pendanaan	53
<b>BAB V</b>	<b>Penutup</b>	<b>55</b>
Lampiran 1	Matriks Kinerja dan Pendanaan	57
Lampiran 2	Berita Acara Reviu Renstra	58
Lampiran 3	Notula Rapat Reviu Renstra	59

**Daftar Tabel**

Tabel	1.1.	Pencapaian Kinerja LLDIKTI Wilayah IX Tahun 2015	2
Tabel	1.2.	Pencapaian Kinerja LLDIKTI Wilayah IX Tahun 2016	3
Tabel	1.3.	Pencapaian Kinerja LLDIKTI Wilayah IX Tahun 2017	4
Tabel	1.4.	Pencapaian Kinerja LLDIKTI Wilayah IX Tahun 2018	5
Tabel	1.5.	Pencapaian Kinerja LLDIKTI Wilayah IX Tahun 2019	6
Tabel	1.6.	Jumlah PT dan Prodi pada LLDIKTI Wilayah IX tahun 2015-2019	8
Tabel	1.7.	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi di Indonesia	9
Tabel	1.8.	Peringkat Akreditasi PTS LLDIKTI Wilayah IX Tahun 2015-2019	10
Tabel	1.9.	Peringkat Akreditasi Program Studi LLDIKTI Wilayah IX Tahun 2015-2019	11
Tabel	1.10.	Jumlah Dosen PNS Dipekerjakan LLDIKTI Wilayah IX Menurut Pangkat dan Golongan Tahun 2015- 2019	13
Tabel	1.11.	Jumlah Dosen DPK dan DTY LLDIKTI Wilayah IX Menurut Jabatan Akademik Tahun 2017-2019	13
Tabel	1.12.	Jumlah Dosen DPK dan DTY LLDIKTI Wilayah IX Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2015-2019	14
Tabel	1.13.	Jumlah Tenaga Kependidikan LLDIKTI Wilayah IX Menurut Pangkat dan Golongan Tahun 2015-2019	15
Tabel	2.1.	Indikator Kinerja Tujuan LLDIKTI Wilayah IX Tahun 2020-2024	33
Tabel	2.2.	Indikator Kinerja Sasaran LLDIKTI Wilayah IX Tahun 2020-2024	34
Tabel	3.1.	Proyeksi Kebutuhan SDM LLDIKTI Wilayah IX Tahun 2020-2024	43
Tabel	4.1.	Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Renstra LLDIKTI Wilayah IX Tahun 2020-2024	46
Tabel	4.2.	Kerangka Pendanaan Rencana Strategis LLDIKTI Wilayah IX Tahun 2020-2024	54



## Daftar Gambar


Gambar	1.1.	Grafik Jumlah PTS Terakreditasi Minimal B LLDIKTI Wilayah IX Tahun 2015-2019	11
Gambar	1.2.	Grafik Jumlah Prodi Terakreditasi Minimal B LLDIKTI Wilayah IX Tahun 2015-2019	12

**Daftar Istilah**

APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APP	Angka Partisipasi Pendidikan
APK	Angka Partisipasi Kasar
ASN	Aparatur Sipil Negara
<i>Author</i>	Penulis
BKD	Beban Kerja Dosen
Bimtek	Bimbingan Teknis
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
Daring	Dalam Jaringan
Dikti	Pendidikan Tinggi
Ditjen	Direktorat Jenderal
Ditjen Risbang	Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
DPK	Dosen Dipekerjakan
DTY	Dosen Tetap yayasan
DU/DI	Dunia Usaha/Dunia Industri
<i>Exchange of information</i>	Pertukaran Informasi FGD
	<i>Focus Group Discussion</i>
<i>Gender</i>	Jenis Kelamin
HKI	Hak kekayaan intelektual
IKT	Indikator Kinerja Tujuan
IKS	Indikator Kinerja Sasaran
IPTEK	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Itjen	Inspektorat Jenderal
<i>Joint research</i>	Riset Gabungan
Kemdikbud	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kopertis	Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
LLDIKTI	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi

Masyarakat Madani	Suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya
NIDN	Nomor Induk Dosen Nasional
<i>Outcome</i>	Keberhasilan
P2M	Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
PDDIKTI	Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
PPNPN	Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri
PPG	Pendidikan Profesi Guru
Prodi	Program Studi
PT	Perguruan Tinggi
PTS	Perguruan Tinggi Swasta
R & D	<i>Research and Development</i>
Renstra	Rencana Strategis
RKA	Rencana Kerja dan Anggaran
RKA-K/L	Rencana Kerja dan Anggaran-Kementerian/Lembaga
RPL	Rekognisi Pembelajaran Lampau
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional





SAKIP	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan
Satker	Satuan Kerja
SDM	Sumber Daya Manusia
Serdos	Sertifikasi Dosen
SKS	Satuan Kredit Semester
SINTA	<i>Science and Technology Index</i>
Simkatmawa	Sistem informasi manajemen pemeringkatan kemahasiswaan
Simlitabmas	Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
SPME	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal
SPMI	Sistem Penjaminan Mutu Internal
SOP	<i>Standard Operating Procedure</i>
<i>Supporting system</i>	Sistem Pendukung
Tracer study	Bantuan Pusat Karir Lanjutan
UMR	Upah Minimum Regional
ZI-WBK/WBBM	Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani

## BAB I Pendahuluan

### 1.1. Kondisi Umum

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX dan selanjutnya disingkat dengan LLDIKTI Wilayah IX adalah merupakan satuan kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah kerja (Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat), yang dipimpin oleh seorang Kepala Lembaga dan bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, maka tugas pokok LLDIKTI adalah menyelenggarakan fungsi: (a). pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan tinggi; (b). pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi; (c). pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pengelolaan perguruan tinggi; (d). pelaksanaan fasilitasi kesiapan perguruan tinggi dalam penjaminan mutu eksternal; (e). pelaksanaan fasilitasi penilaian angka kredit pendidik dan tenaga kependidikan perguruan tinggi; (f). pelaksanaan fasilitasi pendirian perguruan tinggi dan pembentukan program studi; (g). pelaksanaan kerja sama; (h). pengelolaan data dan informasi perguruan tinggi; (i). pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fasilitasi peningkatan mutu perguruan tinggi; dan (j). pelaksanaan administrasi. Dalam rangka meningkatkan peran dan tanggung jawab perguruan tinggi (PT) melaksanakan pendidikan nasional, maka dipandang perlu dikembangkan kemampuan PT berlandaskan pola pendidikan nasional dengan memperhatikan ciri-ciri khas masing-masing PT. Selanjutnya untuk mencapai maksud tersebut di atas, dipandang perlu dilaksanakan peningkatan dan pengembangan PT sesuai dengan pertumbuhan dan pengembangan PT.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada hasil, LLDIKTI Wilayah IX secara konsisten menerapkan manajemen kinerja. Hal ini dilakukan agar kinerja LLDIKTI Wilayah IX berubah dari paradigma yang berorientasi proses/kegiatan menuju manajemen kinerja yang berorientasi

hasil/kinerja.

Pencapaian kinerja berdasarkan pencapaian target indikator kinerja LLDIKTI selama kurun waktu lima tahun (2015-2019) adalah sebagai berikut.

Tabel 1.1  
Pencapaian Kinerja LLDIKTI Wilayah IX  
Tahun 2015

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
			Fisik	%
Peningkatan Tata Kelola LLDIKTI Wilayah IX	APK Perguruan Tinggi	18,50	19,50	105,41
	Jumlah Perguruan Tinggi Masuk TOP 100 Nasional	1	0	0
	Jumlah Perguruan Tinggi Berakreditasi A (Unggul)	1	0	0
	Persentase Program Studi Terakreditasi Minimal B	25	20	80,00
	Persentase Lulusan Bersertifikat Kompetensi dan Profesi	25,00	15,75	63
	Persentase Lulusan Yang Langsung Bekerja	2	1	50
	Jumlah Mahasiswa Berprestasi	55	45	81,82
<b>Realisasi Sasaran Strategis 1</b>				<b>54,32</b>
Peningkatan Layanan Kepada Perguruan Tinggi dan Masyarakat	Persentase Dosen Berkualifikasi S3	4,50	4,25	94,44
	Persentase Dosen Bersertifikat Pendidik	19,0	18,50	97,37
	Jumlah Dosen Dengan Jabatan Lektor Kepala	600	650	108,33
	Jumlah Dosen Dengan jabatan Guru Besar	65	67	103,80
<b>Realisasi Sasaran Strategis 2</b>				<b>100,99</b>
Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing Perguruan Tinggi	Jumlah Publikasi Nasional	375	390	104
	Jumlah Publikasi Internasional	30	29	96,67
	Jumlah Buku Referensi yang diterbitkan	45	47	104,44
	Jumlah HaKI yang didaftarkan	3	2	66,67
	Jumlah Prototipe R & D	1	1	100
<b>Realisasi Sasaran Strategis 3</b>				<b>94,36</b>
<b>Rata – Rata</b>				<b>83,22</b>

Tabel 1.2  
Pencapaian Kinerja LLDIKTI Wilayah IX  
Tahun 2016

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
			Fisik	%
Peningkatan Tata Kelola LLDIKTI Wilayah IX	APK Perguruan Tinggi	20,15	19,75	98,01
	Jumlah Perguruan Tinggi Masuk TOP 100 Nasional	1	0	0
	Jumlah Perguruan Tinggi Berakreditasi A (Unggul)	1	0	0
	Persentase Program Studi Terakreditasi Minimal B	30	25	83,33
	Persentase Lulusan Bersertifikat Kompetensi dan Profesi	35,00	20,50	58,57
	Persentase Lulusan Yang Langsung Bekerja	3	2	68,67
	Jumlah Mahasiswa Berprestasi	65	67	103,08
<b>Realisasi Sasaran Strategis 1</b>				<b>58,81</b>
Peningkatan Layanan Kepada Perguruan Tinggi dan Masyarakat	Persentase Dosen Berkualifikasi S3	5,50	6,50	118,18
	Persentase Dosen Bersertifikat Pendidik	20,5	22,50	109,76
	Jumlah Dosen Dengan Jabatan Lektor Kepala	650	675	103,85
	Jumlah Dosen Dengan jabatan Guru Besar	70	69	98,57
<b>Realisasi Sasaran Strategis 2</b>				<b>107,59</b>
Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing Perguruan Tinggi	Jumlah Publikasi Nasional	400	395	98,75
	Jumlah Publikasi Internasional	35	35	100
	Jumlah Buku Referensi yang diterbitkan	55	57	103,64
	Jumlah HaKI yang didaftarkan	4	3	75
	Jumlah Prototipe R & D	1	1	100
<b>Realisasi Sasaran Strategis 3</b>				<b>95,48</b>
<b>Rata - Rata</b>				<b>87,29</b>

Tabel 1.3  
Pencapaian Kinerja LLDIKTI Wilayah IX  
Tahun 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
			Fisik	%
Peningkatan Tata Kelola LLDIKTI Wilayah IX	APK Perguruan Tinggi	20,26	19	94
	Jumlah Perguruan Tinggi Masuk TOP 100 Nasional	2	1	50
	Jumlah Perguruan Tinggi Berakreditasi A (Unggul)	1	1	100
	Persentase Program Studi Terakreditasi Minimal B	36	50	139
	Persentase Lulusan Bersertifikat Kompetensi dan Profesi	39,95	15	38
	Persentase Lulusan Yang Langsung Bekerja	4	3	75
	Jumlah Mahasiswa Berprestasi	70	75	107
<b>Realisasi Sasaran Strategis 1</b>				<b>86</b>
Peningkatan Layanan Kepada Perguruan Tinggi dan Masyarakat	Persentase Dosen Berkualifikasi S3	6,38	5	78
	Persentase Dosen Bersertifikat Pendidik	23,7	27	114
	Jumlah Dosen Dengan Jabatan Lektor Kepala	750	800	107
	Jumlah Dosen Dengan jabatan Guru Besar	75	70	93
<b>Realisasi Sasaran Strategis 2</b>				<b>98</b>
Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing Perguruan Tinggi	Jumlah Publikasi Nasional	450	525	117
	Jumlah Publikasi Internasional	40	90	225
	Jumlah Buku Referensi yang diterbitkan	60	75	125
	Jumlah HaKI yang didaftarkan	5	7	140
	Jumlah Prototipe R & D	1	1	100
<b>Realisasi Sasaran Strategis 3</b>				<b>141</b>
<b>Rata - Rata</b>				<b>108</b>

Tabel 1.4  
Pencapaian Kinerja LLDIKTI Wilayah IX  
Tahun 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
			Fisik	%
Peningkatan Tata Kelola LLDIKTI Wilayah IX	APK Perguruan Tinggi	20,48	20	98
	Jumlah Perguruan Tinggi Masuk TOP 100 Nasional	2	1	50
	Jumlah Perguruan Tinggi Berakreditasi A (Unggul)	1	1	100
	Persentase Program Studi Terakreditasi Minimal B	31	57	184
	Persentase Lulusan Bersertifikat Kompetensi dan Profesi	20	11	55
	Persentase Lulusan Yang Langsung Bekerja	4	3	75
	Jumlah Mahasiswa Berprestasi	70	70	100
<b>Realisasi Sasaran Strategis 1</b>				<b>95</b>
Peningkatan Layanan Kepada Perguruan Tinggi dan Masyarakat	Persentase Dosen Berkualifikasi S3	10	9	90
	Persentase Dosen Bersertifikat Pendidik	23,22	25	108
	Jumlah Dosen Dengan Jabatan Lektor Kepala	893	902	101
	Jumlah Dosen Dengan jabatan Guru Besar	77	72	94
<b>Realisasi Sasaran Strategis 2</b>				<b>98</b>
Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing Perguruan Tinggi	Jumlah Publikasi Nasional	510	600	118
	Jumlah Publikasi Internasional	75	127	169
	Jumlah Buku Referensi yang diterbitkan	60	80	133
	Jumlah HaKI yang didaftarkan	5	9	180
	Jumlah Prototipe R & D	2	2	100
<b>Realisasi Sasaran Strategis 3</b>				<b>140</b>
<b>Rata - Rata</b>				<b>111</b>



Tabel 1.5  
Pencapaian Kinerja LLDIKTI Wilayah IX  
Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
			Fisik	%
Peningkatan Tata Kelola LLDIKTI Wilayah IX	Jumlah Mahasiswa Yang Berwirausaha	120	197	164
	Persentase Program Studi PTS Terakreditasi Minimal B	60	39	65
	Jumlah Mahasiswa PTS Berprestasi	72	41	57
	Persentase PTS Yang Melakukan Tracer Study	5	20	400
	Jumlah PTS Yang Masuk 100 TOP Nasional	2	0	0
	Jumlah PTS Yang Berakreditasi Minimal B	2	37	1.858
	Persentase Kuantitas Tindak Lanjut Temuan BPK	100	100	100
Persentase Tindak Lanjut Bernilai Rupiah Temuan BPK	100	100	100	
<b>Realisasi Sasaran Strategis 1</b>				<b>343</b>
Peningkatan Layanan Kepada Perguruan Tinggi dan Masyarakat	Persentase Dosen PTS Berkualifikasi S3	12	8,7	72,5
	Persentase Dosen PTS Bersertifikat Pendidik	35	28	80
	Persentase Dosen PTS Dengan Jabatan Lektor Kepala	10	5,2	52
	Jumlah Dosen PTS Dengan Jabatan Guru Besar	1	0,5	50
<b>Realisasi Sasaran Strategis 2</b>				<b>64</b>
Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing Perguruan Tinggi	Jumlah Publikasi Internasional Dari PTS	140	145	103,5
	Jumlah Kekayaan Intelektual Yang Didaftarkan oleh PTS	10	13	130
	Jumlah Prototipe Penelitian dan Pengembangan (R & D)	10	4	40
	Jumlah Prototipe Industri dari PTS	5	1	20
	Jumlah Jurnal PTS Bereputasi Terindeks Nasional	650	145	22,30
Jumlah Sitasi Karya Ilmiah dari PTS	2.200	2.750	125	
<b>Realisasi Sasaran Strategis 3</b>				<b>74</b>
<b>Rata - Rata</b>				<b>160</b>

Pada kurun waktu tahun 2015-2016 belum ada penyeragaman Indikator Kinerja LLDIKTI (dahulu Kopertis). Baru tahun 2017 dilakukan penyeragaman Indikator Kinerja LLDIKTI oleh Ditjen Dikti. Penyeragaman Indikator Kinerja dilakukan hingga tahun 2019. Dengan penyeragaman ini, pencapaian kemajuan mutu pendidikan tinggi terutama pada Perguruan Tinggi Swasta menjadi lebih terarah dan terukur. Tidak hanya berbasis output bahkan hingga berbasis outcome.



Jumlah Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan LLDIKTI Wilayah IX sejak tahun 2015 sampai dengan 2019 mengalami penambahan sebesar 16%. Kebijakan pengurangan jumlah PT untuk peningkatan kualitas pendidikan tinggi, dengan memberikan kemudahan dalam proses Penggabungan/Penyatuan PTS, tidak berdampak pada pengurangan jumlah PT pada LLDIKTI Wilayah IX disebabkan adanya beberapa pendirian PT baru. Jumlah Program Studi sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 mengalami kenaikan sebanyak 35 %. Hal ini dapat difahami sebab program penggabungan/penyatuan PTS tersebut dapat mengakibatkan penambahan jumlah program studi untuk memenuhi syarat perubahan PTS ke bentuk yang lebih besar termasuk pendirian PT Baru.

Tabel 1.6  
Jumlah Perguruan Tinggi dan Program Studi  
Di Lingkungan LLDIKTI Wilayah IX  
Tahun 2015 - 2019

No	Bentuk	PT/PS	2015	2016	2017	2018	2019
1	Universitas	PT	36	38	44	50	58
		PS	867	920	975	1.065	1.231
2	Institut	PT	3	3	3	4	6
		PS	27	27	27	37	49
3	Sekolah Tinggi	PT	159	160	166	172	175
		PS	614	653	669	697	765
4	Akademi	PT	109	109	110	111	111
		PS	218	219	227	234	256
5	Politeknik	PT	5	6	7	9	12
		PS	48	54	60	74	93
6	Akademi Komunitas	PT	1	1	1	2	2
		PS	2	2	2	5	5
<b>Jumlah</b>		<b>PT</b>	<b>313</b>	<b>317</b>	<b>331</b>	<b>348</b>	<b>364</b>
		<b>PS</b>	<b>1.776</b>	<b>1.875</b>	<b>1.960</b>	<b>2.112</b>	<b>2.399</b>

### Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi

Angka Partisipasi Kasar (APK) atau Gross Enrollment Ratio (GER) merupakan kelaziman universal dalam menghitung besarnya jumlah masyarakat yang melanjutkan pendidikan dari suatu jenjang pendidikan tertentu, termasuk APK Pendidikan Tinggi. Dengan demikian APK Pendidikan Tinggi yang diraih dalam suatu negara memiliki arti penting sebagai salah satu indikator capaian Indeks Pendidikan Tinggi dalam suatu Negara tersebut. Besarnya Angka Partisipasi Kasar suatu jenjang pendidikan menunjukkan

kualitas layanan pemerintah terhadap hak masyarakat dalam memperoleh akses pendidikan. Sejalan dengan hal tersebut, besaran Angka Partisipasi Kasar (APK) juga menunjukkan bahwa masyarakat memperoleh kemudahan dalam akses menempuh Pendidikan Tinggi. Dengan demikian, persentase APK dapat digunakan sebagai penentu tingkat kualitas layanan pembelajaran dan kemahasiswaan perguruan tinggi.

Sebagaimana negara-negara maju, maka kemajuan pendidikan tingginya juga dikaitkan dengan seberapa besar APK Pendidikan Tinggi di negara tersebut. Angka Partisipasi Kasar (APK), menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK Pendidikan Tinggi Indonesia tahun 2018, menunjukkan angka 33,37 %, Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada periode akhir Renstra tahun 2019 yaitu sebesar 32,55%, capaian APK Pendidikan Tinggi pada tahun 2017 juga sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu naik sebesar 102,50% (Kemenristekdikti, 2018).

Tabel 1.7

APK Perguruan Tinggi di Indonesia  
Menurut Provinsi Tahun 2015 s.d. 2019

Provinsi	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) Menurut Provinsi				
	2015	2016	2017	2018	2019
ACEH	41.67	42.06	45.73	43.86	44.51
SUMATERA UTARA	25.89	28.93	30.71	31.11	30.82
SUMATERA BARAT	38.51	40.54	43.53	44.19	42.18
RIAU	30.00	29.81	33.37	34.15	33.93
JAMBI	26.33	26.98	32.27	33.78	30.71
SUMATERA SELATAN	18.60	21.64	23.77	26.23	25.59
BENGKULU	36.53	41.00	41.52	38.31	37.63
LAMPUNG	12.46	16.05	18.84	21.32	21.98
KEP. BANGKA BELITUNG	11.13	14.48	15.01	13.20	14.27
KEP. RIAU	21.14	22.11	23.08	27.64	25.11
DKI JAKARTA	32.72	33.58	34.94	36.71	39.43
JAWA BARAT	21.31	24.59	25.50	25.14	25.15
JAWA TENGAH	19.28	19.69	21.88	21.96	21.80
DI YOGYAKARTA	64.83	65.51	70.10	70.60	73.14
JAWA TIMUR	22.14	28.13	30.23	29.99	29.20
BANTEN	23.60	29.02	31.40	33.40	33.22
BALI	32.06	31.61	35.81	36.40	35.96
NUSA TENGGARA BARAT	26.30	25.89	28.09	29.75	30.70
NUSA TENGGARA TIMUR	24.51	26.92	29.21	30.14	30.22

KALIMANTAN BARAT	19.24	20.98	23.04	22.68	24.87
KALIMANTAN TENGAH	21.10	23.90	24.89	25.24	25.45
KALIMANTAN SELATAN	24.56	23.24	26.08	26.41	27.04
KALIMANTAN TIMUR	28.44	31.60	35.58	35.64	37.78
KALIMANTAN UTARA	18.25	24.35	26.76	21.58	23.43
SULAWESI UTARA	27.68	31.32	31.74	35.00	33.86
SULAWESI TENGAH	31.56	35.30	39.22	40.61	38.64
SULAWESI SELATAN	40.44	40.75	43.00	41.23	42.72
SULAWESI TENGGARA	42.31	45.35	46.98	46.42	47.56
GORONTALO	30.35	32.23	37.88	35.23	36.71
SULAWESI BARAT	25.51	27.54	29.72	28.90	30.85
MALUKU	44.46	46.38	47.39	48.42	47.65
MALUKU UTARA	33.72	40.87	45.01	42.68	44.02
PAPUA BARAT	32.83	32.37	36.32	35.97	34.83
PAPUA	16.01	20.44	20.37	19.03	21.08
<b>INDONESIA</b>	<b>25.26</b>	<b>27.98</b>	<b>29.93</b>	<b>30.19</b>	<b>30.28</b>

Sumber: <https://www.bps.go.id>.

## Kualitas Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan LLDIKTI Wilayah IX

### A. Akreditasi Perguruan Tinggi

Tabel 1.8

Peringkat Akreditasi PTS LLDIKTI Wilayah IX  
Tahun 2015 s.d. 2019

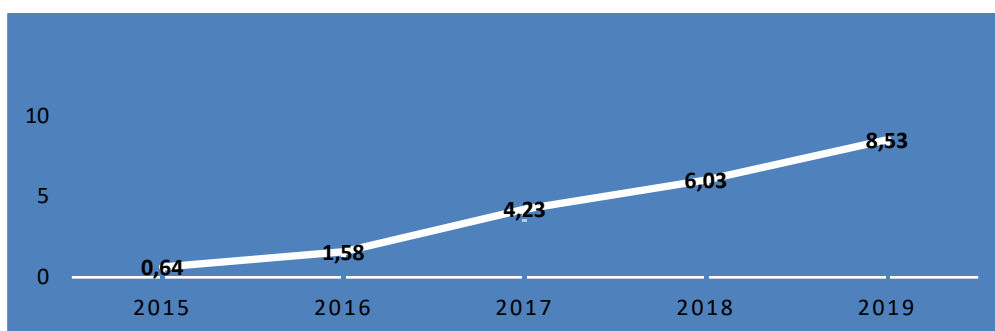
TAHUN	AKREDITASI PERGURUAN TINGGI				JML PTS
	A	B	C	Tidak Terakreditasi	
2015	0	2	17	294	313
2016	0	5	33	279	317
2017	0	14	51	266	331
2018	1	20	70	257	348
2019	1	30	86	247	364

Data APT selama lima tahun terakhir menunjukkan bahwa kualitas PTS di lingkungan LLDIKTI Wilayah IX meningkat secara signifikan. Berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan pada tahun 2015, yakni jumlah perguruan tinggi terakreditasi minimal B, maka diperoleh bahwa pada tahun 2015 sebanyak 2 PTS (0,64%), pada tahun 2016 sebanyak 5 PTS (1,58%), pada tahun 2017 sebanyak 14 PTS (4,23%), pada tahun 2018 sebanyak 21 PTS (6,03%), pada tahun 2019 sebanyak 31 PTS (8,53%).

Sementara jika dilihat dari jumlah PTS terakreditasi (A,B, dan C) yakni sebesar (6,07%) pada tahun 2015, (11,99%) pada tahun 2016, (19,64%) pada tahun 2017, (26,15%) pada tahun 2018 dan mencapai (32,14%) pada tahun 2019.

Grafik 1.1

Jumlah PTS Terakreditasi Minimal B  
Tahun 2015 s.d 2019



## B. Akreditasi Program Studi

Tabel 1.9

Peringkat Akreditasi Prodi PTS LLDIKTI Wilayah IX  
Tahun 2015 s.d. 2019

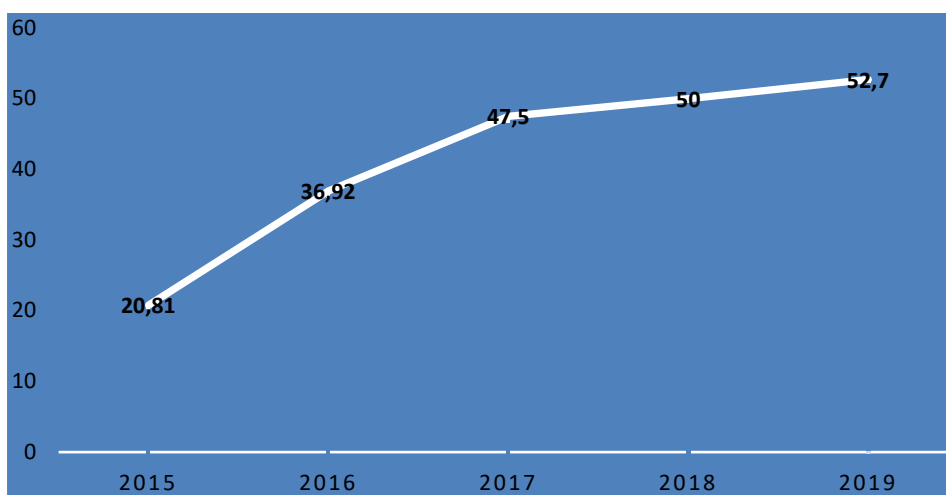
TAHUN	AKREDITASI PROGRAM STUDI				JML PRODI
	A	B	C	Tidak Terakreditasi	
2015	0	41	154	2	197
2016	6	121	215	2	344
2017	17	239	281	2	539
2018	22	348	368	2	740
2019	28	509	480	2	1.019
<b>TOTAL</b>	<b>73</b>	<b>1258</b>	<b>1498</b>	<b>10</b>	<b>2.839</b>



Begitu pula untuk program studi yang terakreditasi minimal B selama lima tahun terakhir menunjukkan bahwa kualitas Program Studi PTS di lingkungan LLDIKTI Wilayah IX meningkat secara signifikan. Berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan pada tahun 2015, yakni jumlah program studi terakreditasi minimal B, maka diperoleh bahwa pada tahun 2015 sebanyak 41 Prodi (20,81%), pada tahun 2016 sebanyak 127 Prodi (36,92%), pada tahun 2017 sebanyak 256 Prodi (47,50%), pada tahun 2018 sebanyak 370 Prodi (50,00%), pada tahun 2019 sebanyak 537 Prodi (52,70%).

Sementara jika dilihat dari jumlah PTS terakreditasi (A,B, dan C) yakni sebesar (98,98%) pada tahun 2015, (99,42%) pada tahun 2016, (99,63%) pada tahun 2017, (99,73%) pada tahun 2018 dan mencapai (99,80%) pada tahun 2019.

Grafik 1.2  
Jumlah Program Studi Terakreditasi Minimal B  
Tahun 2015 s.d 2019



## Sumber Daya Manusia

## A. Tenaga Pendidik

Tabel 1.10  
Jumlah Dosen PNS Dipekerjakan  
Menurut Pangkat dan Golongan Ruang

No.	Golongan	Pangkat	2015	2016	2017	2018	2019
1	IV/e	Pembina Utama	17	17	16	15	15
2	IV/d	Pembina Utama Madya	30	29	28	27	25
3	IV/c	Pembina Utama Muda	103	97	96	94	71
4	IV/b	Pembina Tk. I	195	391	389	387	156
5	IV/a	Pembina	272	272	270	268	247
6	III/d	Penata Tk. I	124	119	118	116	101
7	III/c	Penata	178	176	175	173	163
8	III/b	Penata Muda Tk. I	76	71	70	69	64
9	III/a	Penata Muda	35	32	31	30	22
<b>Jumlah</b>			<b>1.030</b>	<b>1.204</b>	<b>1.193</b>	<b>1.179</b>	<b>864</b>

Tabel 1.11  
Jumlah Dosen DPK dan DTY  
Menurut Jabatan Akademik

No	Jabatan Akademik	2017	2018	2019
1	Professor	74	93	107
2	Lektor Kepala	666	697	760
3	Lektor	1.896	2.264	2.738
4	Asisten Ahli	3.764	4.681	5.526
5	Tenaga Pengajar	7.704	8.062	8.728
<b>Jumlah</b>		<b>14.104</b>	<b>15.797</b>	<b>17.859</b>

Tabel 1.12

Jumlah Dosen DPK dan DTY Menurut Jenjang Pendidikan

Periode Tahun 2015 s.d. 2019

2015						2016						2017						2018						2019					
S1	Profesi	S2	Sp-1	S3	Sp-2	S1	Profesi	S2	Sp-1	S3	Sp-2	S1	Profesi	S2	Sp-1	S3	Sp-2	S1	Profesi	S2	Sp-1	S3	Sp-2	S1	Profesi	S2	Sp-1	S3	Sp-2
306	6	451	1	18	-	220	5	564	1	25	-	158	1	631	2	34	-	78	2	694	2	50	-	21	1	745	2	58	-
196	23	178	-	2	1	166	23	222	-	5	1	111	14	291	-	10	1	82	13	320	-	11	1	44	10	359	-	14	1
2.261	419	4.890	20	561	4	1.712	330	5.520	22	715	4	1.218	244	5.984	27	865	4	831	167	6.307	33	1.015	5	605	108	6.455	37	1.157	6
435	51	787	-	38	-	325	43	924	-	43	-	237	36	1.014	-	54	-	167	26	1.085	-	63	-	134	16	1.119	-	74	-
550	48	877	1	27	-	446	42	1.007	1	36	-	305	31	1.156	1	46	-	197	19	1.259	1	64	-	137	14	1.304	1	85	-
517	38	612	-	47	1	412	42	728	-	54	1	322	35	820	-	67	1	256	18	901	-	72	1	219	10	943	-	78	1
<b>4.265</b>	<b>585</b>	<b>7.795</b>	<b>22</b>	<b>693</b>	<b>6</b>	<b>3.281</b>	<b>485</b>	<b>8.965</b>	<b>24</b>	<b>878</b>	<b>6</b>	<b>2.351</b>	<b>361</b>	<b>9.896</b>	<b>30</b>	<b>1.076</b>	<b>6</b>	<b>1.611</b>	<b>245</b>	<b>10.566</b>	<b>36</b>	<b>1.275</b>	<b>7</b>	<b>1.160</b>	<b>159</b>	<b>10.925</b>	<b>40</b>	<b>1.466</b>	<b>8</b>

## B. Tenaga Kependidikan

Tabel 1.13

Jumlah Tenaga Kependidikan LLDIKTI Wilayah IX  
Menurut Pangkat dan Golongan.

No.	Golongan	Pangkat	2015	2016	2017	2018	2019
1	IV/e	Pembina Utama	0	0	0	0	0
2	IV/d	Pembina Utama Madya	0	0	0	0	0
3	IV/c	Pembina Utama Muda	1	1	1	1	0
4	IV/b	Pembina Tk. I	3	2	2	3	3
5	IV/a	Pembina	16	16	16	15	15
6	III/d	Penata Tk. I	15	14	14	15	15
7	III/c	Penata	6	6	5	18	17
8	III/b	Penata Muda Tk. I	18	18	16	12	12
9	III/a	Penata Muda	12	12	12	7	7
10	II/d	Pengatur Tk. I	7	6	6	2	2
11	II/c	Pengatur	2	2	2	1	1
12	II/b	Pengatur Muda Tk. I	3	3	3	8	8
13	II/a	Pengatur Muda	8	8	8	2	2
14	I/d	Juru Tk. I	2	2	2	3	3
15	I/b	Juru	1	1	1	0	0
16	I/c	Juru Muda Tk. I	0	0	0	0	0
17	I/a	Juru Muda	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>			<b>94</b>	<b>91</b>	<b>88</b>	<b>87</b>	<b>85</b>

Pada renstra Kemdikbud disebutkan bahwa pada jenjang pendidikan tinggi, ditengarai ada empat masalah penyebab rendahnya hasil pembelajaran: (1) rendahnya keterkaitan dengan DU/DI sebagaimana terlihat dari rendahnya keterlibatan industry dalam penyusunan kurikulum di politeknik dan universitas dan kurangnya program pemagangan yang terstruktur, sehingga kompetensi lulusan kurang relevan dengan kebutuhan DU/DI; (2) kurang berkembangnya potensi dosen karena beban administrasi dosen yang tinggi, keharusan melaksanakan tridarma oleh semua dosen (tridarma seharusnya menjadi misi di tingkat institusi, bukan misi individu), kenaikan jabatan akademik yang terpusat perizinannya di kementerian, serta akreditasi yang terpaku pada administrasi dan keseragaman; (3) kurikulum yang kaku seperti tampak dari ketiadaan kesempatan untuk mengambil mata kuliah interdisipliner yang terintegrasi dengan

program studi serta terbatasnya kurikulum vokasi sistem ganda (*dual TVET system*); dan (4) lemahnya kompetensi dosen yang dapat dilihat dari pola rekrutmen dosen berbasis kualifikasi akademik, bukan kompetensi ataupun pengalaman di DU/DI, keterbatasan pengetahuan dosen tentang praktik-praktik di DU/DI, dan 50% (lima puluh persen) dosen lulus dari perguruan tinggi yang sama dengan tempatnya berkarya (masalah *inbreeding*). Di samping permasalahan rendahnya hasil pembelajaran, pendidikan tinggi Indonesia juga menghadapi tantangan dalam tata kelola, yang dibayangi oleh disparitas akses pendidikan yang bersifat struktural. Tata kelola pendidikan tinggi masih diwarnai oleh ketimpangan kualitas. Ada banyak PTS dengan jumlah mahasiswa kecil dan kualitas yang rendah (71% dari 3700 PTS). Secara institusional, banyak perguruan tinggi yang tata kelola internalnya masih belum sehat. Hasil penelitian perguruan tinggi belum dikelola secara maksimal, sebagaimana terlihat dari rendahnya pemanfaatan hasil penelitian oleh industri. Tak dapat dipungkiri, pendanaan pendidikan tinggi Indonesia masih rendah dibandingkan dengan pendanaan negara ASEAN lainnya seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Di balik permasalahan yang dihadapi pendidikan tinggi Indonesia, terdapat disparitas akses pendidikan antar kuintil ekonomi masyarakat. Pada kuintil terendah, hanya 10% (sepuluh persen) masyarakat dapat mengakses pendidikan tinggi. Sedangkan, pada kuintil tertinggi, akses sudah mencapai 60% (enam puluh persen). Disparitas akses ini bersifat struktural, terjadi pada segala jenjang pendidikan, mulai dari SMP. Berkaca dari permasalahan yang ada, Kemendikbud mengidentifikasi 9 (sembilan) tantangan yang dihadapi dalam pemajuan pendidikan berkenaan dengan ekosistem pendidikan, guru, pedagogi, dan kurikulum/program.

#### **Tantangan Pemajuan Pendidikan:**

1. Memerdekakan pembelajaran sebagai beban menjadi pembelajaran sebagai pengalaman menyenangkan
2. Memerdekakan sistem pendidikan yang tertutup (pemangku kepentingan bertindak sendiri-sendiri) menjadi sistem pendidikan yang terbuka (pemangku kepentingan bekerja sama)
3. Memerdekakan guru sebagai penerus pengetahuan menjadi guru sebagai fasilitator pembelajaran

4. Memerdekakan pedagogi, kurikulum, dan asesmen yang dikendalikan oleh konten menjadi berbasis kompetensi dan nilai-nilai
5. Memerdekakan pendekatan pedagogi yang bersifat pukol rata (*one size fits all*) menjadi berpusat pada peserta didik dan personalisasi
6. Memerdekakan pembelajaran manual/tatap muka menjadi pembelajaran yang difasilitasi oleh teknologi
7. Memerdekakan program-program pendidikan yang dikendalikan oleh pemerintah menjadi program yang relevan bagi industri
8. Memerdekakan pendidikan yang dibebani oleh perangkat administrasi menjadi bebas untuk berinovasi
9. Memerdekakan ekosistem pendidikan yang dikendalikan pemerintah menjadi ekosistem yang diwarnai oleh otonomi dan partisipasi aktif (*agency*) semua pemangku kepentingan



## 1.2. Permasalahan yang masih Dihadapi dan Potensi

Dalam menghadapi berbagai tantangan dunia pendidikan tinggi, LLDIKTI Wilayah IX dihadapkan pada beberapa permasalahan strategis antara lain:

### A. Kualitas SDM

#### 1. Tenaga Pendidik dan Kependidikan PTS

- Masih banyak dosen yang belum memiliki Jabatan Akademik
- Kualifikasi pendidikan dosen masih minim yg S3
- Kurangnya PTS dalam mengalokasikan dana penelitian
- Kemampuan dosen terhadap Teknologi Informasi masih kurang, terutama dosen yang telah berusia lanjut
- Masih terdapat Pimpinan PTS yang kurang memberikan motivasi dalam peningkatan jabatan akademik dosen
- Banyak dosen yang tidak memahami prosedur pengajuan proposal penelitian hibah Ristek/BRIN
- Terkait pelaporan PDDIKTI, kualitas SDM operator PTS kurang memadai dalam hal kemampuan IT/laboran/pustakawan, dll

#### 2. Mahasiswa/profil lulusan

- Kualitas lulusan belum sesuai dengan standar kompetensi lulusan (KKNI)
- Tidak semua lulusan memiliki sertifikat kompetensi sebagai surat keterangan pendamping ijazah
- Proses perkuliahan dan ujian belum sepenuhnya memenuhi standar

### B. Kualitas PTS

1. Akreditasi PT dan PS (masih banyak PT/PS belum terakreditasi), belum munculnya budaya mutu secara internal.
2. Pelaporan PDDIKTI, masih banyak PT yang pelaporannya tidak 100%
3. Tidak terpenuhinya standard minimal sarana dan prasarana PTS

### C. Internal LLDIKTI Wilayah IX

1. Perubahan kementerian pada bulan Oktober 2019 juga berdampak pada perubahan organisasi Pembina LLDIKTI, dengan adanya perubahan ini proses adaptasi terhadap perubahan kebijakan harus segera dilakukan dan meningkatkan koordinasi untuk menyesuaikan dengan kebijakan-kebijakan terbaru;
2. Sumber daya pendukung pelayanan, masalah ini muncul akibat dari kekurangan sumber daya manusia pendukung pelayanan sehingga untuk mengoptimalkan layanan perlu didukung teknologi informasi yang memadai agar pelayanan berjalan secara optimal, sampai pada tahun 2020 ini, LLDIKTI Wilayah IX telah memanfaatkan dukungan teknologi informasi dalam proses pelayanan kepada stakeholder;
3. Struktur sumber daya manusia sebagai komponen utama penggerak organisasi, masalah ini muncul akibat berakhirnya masa bakti sumber daya manusia tersebut serta belum terdapatnya formasi untuk menggantikan sumber daya manusia yang telah memasuki masa purnabakti. Hasil analisis beban kerja terakhir yang dilakukan Subbagian Hukum, Kepegawaian, dan Tata Laksana mengusulkan adanya kekurangan 30 orang untuk mengisi seluruh formasi jabatan yang ada di LLDIKTI Wilayah IX, agar dapat berfungsi secara maksimal;
4. Sumber daya anggaran, masalah ini muncul pada kegiatan-kegiatan penunjang capaian indikator kinerja yang belum terdapat alokasi dari Direktorat Jenderal yang membina indikator kinerja tersebut;
5. Baseline atau data dasar yang menjadi pijakan dalam penetapan keluaran, belum sepenuhnya akurat, karena belum adanya suatu sistem yang bisa menjamin validitas data yang baik, sehingga baseline atau data dasar yang menjadi pijakan dalam penetapan keluaran belum dapat dikatakan ideal.
6. Belum punya akses untuk mengevaluasi/memantau laporan kemajuan penelitian dan laporan akhir di simlitabmas.
7. Tidak memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan pembukaan periode pelaporan PDDIKTI

### Tantangan Renstra Periode 2020-2024

Ada beberapa tantangan kedepan yang harus dilewati dalam menjalankan Renstra periode 2020-2024, antara lain:

1. Menghadapi era disruptif teknologi
  - a. Kualitas SDM yang adaptif terhadap perubahan
  - b. PT harus mulai terbiasa dengan pembelajaran jarak jauh.
  - c. Reviu terhadap kebijakan pendirian PT.
2. Mendorong PTS untuk menyiapkan diri dalam program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM)

Masih sulit untuk mengkonversi pendidikan formal, informal dan pengalaman kerja terhadap penghargaan SKS
3. Heterogenya bentuk perguruan tinggi yang menjadi stakeholder di LLDIKTI Wilayah IX menjadi permasalahan tersendiri dalam penentuan kebijakan yang ideal untuk diterapkan, karena idealnya satu kebijakan tidak dapat diterapkan secara umum kepada seluruh perguruan tinggi, seharusnya ada klasterisasi dalam perumusan kebijakan tersebut;
4. Terjadinya duplikasi kegiatan teknis yang terjadi akibat dari pendelegasian kewenangan yang belum terjadi antara unit utama dan LLDIKTI sehingga membuat tidak optimalnya kebijakan yang dijalankan;
5. Intergrasi data pada aplikasi ditingkat unit utama belum sepenuhnya terlaksana, sehingga masih terdapat duplikasi data yang menjadi sumber penentuan kebijakan.

## BAB II Visi, Misi dan Tujuan

### 2.1. Visi LLDIKTI Wilayah IX

Sebagai Unit Pelaksana Teknis Eselon II di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX dalam menentukan visinya berdasarkan pada Visi Kemendikbud 2020-2024, Visi Presiden pada RPJMN Tahun 2020-2024, serta Visi Indonesia 2045. Adapun Visi LLDIKTI Wilayah IX adalah: Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi mendukung Visi dan Misi Kemdikbud untuk **mewujudkan Indonesia Maju melalui kualitas pendidikan tinggi yang menghasilkan SDM berkualitas** (melalui terciptanya mahasiswa pancasilais yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, berkepribadian, berdaulat, mandiri, bernalar kritis, kreatif, mandiri, bergotong royong, dan berkebinekaan global).

Gambar 2.1 Pelajar Pancasila



Visi tersebut di atas menggambarkan komitmen Kemendikbudristek mendukung terwujudnya visi dan misi Presiden melalui pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dimiliki secara konsisten, bertanggung jawab, dapat dipercaya, dengan mengedepankan profesionalitas dan integritas. Oleh karena itu, perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan akan mengedepankan inovasi guna

mencapai kemajuan dan kemandirian Indonesia. Sesuai dengan kepribadian bangsa yang berlandaskan gotong royong, Kemendikbudristek dan seluruh pemangku kepentingan, bekerja bersama untuk memajukan Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sesuai dengan Visi dan Misi Presiden tersebut.

Sejalan dengan perwujudan visi dan misi Presiden tersebut, Kemendikbudristek sesuai dengan tugas dan kewenangannya, juga berkomitmen untuk menciptakan Pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan enam ciri utama: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif, seperti ditunjukkan oleh Gambar 2.1 di atas. Keenam ciri tersebut dijabarkan sebagai berikut:

**a. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia:**

Pelajar Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Ada lima elemen kunci beriman, (a) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia: akhlak beragama; (b) akhlak pribadi; (c) akhlak kepada manusia; (d) akhlak kepada alam; dan (e) akhlak bernegara.

**b. Berkebinekaan global**

Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Elemen kunci dari berkebinekaan global meliputi mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, dan refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Bergotong royong Pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan suka rela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah dan ringan. Elemen-elemen dari bergotong royong adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Mandiri Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu

pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci dari mandiri terdiri dari kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri.

### c. Bernalar kritis

Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkannya. Elemen-elemen dari bernalar kritis adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir, dan mengambil keputusan.

### d. Kreatif

Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Elemen kunci dari kreatif terdiri dari menghasilkan gagasan yang orisinal serta menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal.

Keenam karakteristik ini terwujud melalui penumbuhkembangan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila yang adalah pondasi bagi segala arahan pembangunan nasional. Dengan identitas budaya Indonesia dan nilai-nilai Pancasila yang berakar dalam, masyarakat Indonesia ke depan akan menjadi masyarakat terbuka yang berkewargaan global, dapat menerima dan memanfaatkan keragaman sumber, pengalaman, serta nilai-nilai dari beragam budaya yang ada di dunia, namun sekaligus tidak kehilangan ciri dan identitas khasnya

## Merdeka Belajar

Bapak pendidikan Indonesia, Ki Hadjar Dewantara, menyatakan bahwa paradigma pendidikan yang memerdekakan memiliki 3 (tiga) ciri yaitu: Tidak Hidup Terperintah Peserta didik belajar dengan kesadaran dari dalam diri sendiri, bukan karena paksaan atau perintah orang lain. Berdiri Tegak karena Kekuatan Sendiri Peserta didik berdiri tegak karena kekuatan sendiri dan mampu menemukan cara dalam mengatasi kesulitan belajar. Cakap Mengatur Hidupnya dengan Tertib Peserta didik mampu menilai tindakan dan kemajuan belajarnya sehingga dapat melakukan perbaikan untuk mencapai tujuan belajar. Pada hakikatnya gagasan Ki Hadjar Dewantara yang kemudian disebut sebagai Merdeka Belajar, sejalan dengan konsep self regulated learning yang telah dikaji oleh beberapa ahli



seperti Zimmerman; Boekaerts, Winne dan Hadwin, Pintrich; Efklides, serta Hadwin, Järvelä dan Miller (Panadero, 2017). Self regulated learning adalah keyakinan seseorang terhadap kapasitas dirinya dalam menentukan tindakan, pikiran dan perasaan yang mengarah pada pencapaian tujuan, sembari melakukan monitoring diri dan refleksi diri terhadap kemajuan dalam mencapai target. Merdeka belajar menjadi semangat yang menjiwai keseluruhan arah kebijakan dan strategi bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Semangat merdeka belajar berarti menekankan murid, guru, orang tua, satuan pendidikan, daerah, komunitas pendidikan, yayasan pendidikan, dunia usaha, dan dunia industri serta pelaku pendidikan lainnya sebagai aktor yang otonom dan berdaya. Pelaku pendidikan berdaya mengembangkan praktik-praktik baik pembelajaran, manajemen pendidikan, dan kepemimpinan pendidikan yang perlu diperkuat dan ditularkan ke seluruh ekosistem pendidikan sehingga membentuk pembelajaran yang berkualitas.

Semangat merdeka belajar, membentuk 5 (lima) pergeseran paradigma dalam kepemimpinan dan pengelolaan pendidikan, sebagai berikut:

- a. Semula mekanisme kontrol menjadi pemberdayaan melalui umpan balik. Mekanisme kontrol terbukti tidak selalu efektif serta dapat menimbulkan tekanan dan orientasi yang keliru. Dalam ekosistem yang berdampak, umpan balik yang berkelanjutan menjadikan semua pihak lebih berdaya.
- b. Semula arahan menjadi penguatan praktik baik di lapangan. Kepemimpinan pendidikan dengan semangat merdeka belajar tidak menjadikan instruksi sebagai satu-satunya bentuk komunikasi, akan tetapi kepemimpinan yang mendengarkan, memahami, dan mengenali praktik baik di lapangan. Upaya penguatan praktik baik akan menumbuhkan kepercayaan diri dan inisiatif pelaku pendidikan melakukan inovasi pembelajaran dan pendidikan.
- c. Semula apresiasi hanya bagi yang terbaik menjadi bagi semua kemajuan. Apresiasi hanya bagi yang terbaik dapat menimbulkan demotivasi bagi mereka yang merasa tidak berdaya. Semangat merdeka belajar mendorong pengelolaan pendidikan yang mengapresiasi semua kemajuan yang terjadi, bahkan untuk kemajuan kecil oleh satuan pendidikan kecil yang masih berusaha meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan semangat merdeka belajar ini, pelaku dalam ekosistem pendidikan akan lebih aktif dan

lebih merasa berdaya, di manapun posisinya saat ini.

- d. Semula kompetisi menjadi kolaborasi untuk kemajuan bersama. Semangat merdeka belajar tanpa meninggalkan kompetisi, tapi lebih menonjolkan nilai-nilai gotong royong dalam bentuk kolaborasi antarpihak. Dengan kolaborasi, akan lebih banyak energi dan dukungan bagi semua pelaku untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Pendidikan bukan hanya tanggung jawab satu dua pihak tapi tanggung jawab bersama demi masa depan anak bangsa.
- e. Semula berfokus pada peningkatan akses menjadi peningkatan kualitas dan keadilan pendidikan. Semangat merdeka belajar memperluas fokus pembangunan pendidikan pada peningkatan kualitas dan keadilan pendidikan. Hal ini mendorong lebih banyak kebijakan afirmatif dan asimetris untuk memastikan semua anak mendapatkan pembelajaran yang berkualitas.

Semangat merdeka belajar pada akhirnya selaras dengan arah kebijakan nasional yang terkait dengan otonomi daerah, otonomi kampus, dan manajemen berbasis sekolah. Semangat merdeka belajar mendorong penguatan semua pihak untuk menjadi otonom sehingga bisa mencapai tujuan pendidikan nasional dengan berpijak pada konteks satuan pendidikan dan daerah masing-masing.

Dalam kurun waktu 2020-2024, Kemendikbudristek sebagai kementerian yang membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan, sejalan dengan pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 berupaya melakukan transformasi yang berkelanjutan di bidang pendidikan dan kebudayaan di Indonesia. Ini didasarkan pada keyakinan bahwa dalam menghadapi tantangan Abad 21, perlu melakukan transformasi dan perbaikan signifikan di bidang pendidikan dan kebudayaan Indonesia. Dalam rangka mencapai visi pembangunan bidang pendidikan Kemdikbudristek akan terus meningkatkan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pembangunan pendidikan dasar dan menengah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, Kemdikbudristek juga melaksanakan pembangunan pendidikan tinggi di seluruh wilayah Indonesia. Agar terwujud masyarakat Indonesia yang merupakan pembelajar seumur

hidup, layanan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi perlu diperluas tanpa perbedaan atas faktor apapun. Satuan pendidikan, keluarga, masyarakat, dan sektor swasta bersama-sama dalam mengupayakan pengembangan potensi peserta didik lewat olah hati, pikir, rasa dan raga yang seimbang demi terwujudnya insan-insan yang berketuhanan dan berakhlak mulia. Hal tersebut tidak dapat terjadi tanpa komitmen semua pemangku kepentingan pendidikan, baik yang berada dalam pemerintahan maupun masyarakat luas, dalam mengelola dan membiayai pembangunan pendidikan dan kebudayaan. Dalam rangka mencapai visi pembangunan bidang kebudayaan, Kemdikbudristek terus memperkuat ketahanan budaya Indonesia dan menggali potensi kebudayaan untuk membangun kesejahteraan bangsa. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Kemendikbud memberikan kepastian landasan hukum untuk meningkatkan ketahanan budaya bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai, tradisi, dan sejarah Indonesia. Dengan demikian, jati diri dan kepercayaan diri bangsa terus kokoh dalam menghadapi pengaruh dan dampak masuknya budaya-budaya eksternal ke Indonesia. Semakin maraknya industri kreatif berbasis budaya menjadi kesempatan sekaligus tantangan.

Berbagai aktivitas kebudayaan melalui sektor industri kreatif dan pariwisata menyokong pembangunan ekonomi, stabilitas sosial, dan kelestarian lingkungan hidup. Sinergi antara kebudayaan dan industri membangun insan-insan Indonesia yang adaptif dalam menghadapi perubahan zaman dan sanggup berinteraksi di tataran lokal maupun global tanpa meninggalkan nilai-nilai tradisional dan kebudayaannya. Di sisi lain, kondisi SDM di bidang kebudayaan, yang merupakan komponen pokok bagi pembangunan berkelanjutan, masih perlu diperkuat. Pelestarian berbagai warisan budaya baik yang bersifat benda maupun tak benda perlu disokong secara holistik integratif, antara lain melalui pengelolaan cagar budaya, pelestarian bahasa daerah, dan peningkatan diplomasi budaya agar budaya Indonesia lebih dikenal di kancah internasional.

## 2.2. Misi LLDIKTI Wilayah IX

Untuk mendukung pencapaian Visi Presiden, Kemendikbud sesuai tugas dan kewenangannya, melaksanakan Misi Presiden yang dikenal sebagai Nawacita kedua, yaitu menjabarkan misi nomor (1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia; nomor (5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; dan nomor (8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Untuk itu, misi LLDIKTI Wilayah IX dalam mencapai visinya adalah:

1. melakukan pemetaan mutu pendidikan tinggi di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat;
2. melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat;
3. melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu pengelolaan perguruan tinggi di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat;
4. melaksanakan fasilitasi kesiapan perguruan tinggi dalam penjaminan mutu eksternal di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat;
5. melaksanakan fasilitasi penilaian angka kredit pendidik dan tenaga kependidikan perguruan tinggi;
6. melaksanakan fasilitasi pendirian perguruan tinggi dan pembentukan program studi;
7. melaksanakan kerja sama;
8. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu perguruan tinggi di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat;
9. melakukan pengelolaan data dan informasi di bidang mutu pendidikan tinggi di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat; dan
10. melaksanakan administrasi LLDIKTI secara akuntabel.

## 2.3. Tata Nilai

Pelaksanaan misi dan pencapaian visi memerlukan penerapan tata nilai yang sesuai dan mendukung. Tata nilai merupakan dasar sekaligus arah bagi sikap dan perilaku seluruh pegawai Kemendikbudristek dalam menjalankan tugas membangun pendidikan dan kebudayaan. Tata nilai yang diutamakan pada Renstra 2020-2024 ini adalah sebagai berikut:

### 1. Integritas

Pada nilai integritas terkandung makna keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Sesuai dengan nilai integritas, pegawai Kemendikbudristek diharapkan konsisten dan teguh dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan, terutama dalam hal kejujuran dan kebenaran dalam tindakan dan mengemban kepercayaan. Adapun indikator yang mencerminkan nilai integritas adalah:

- 2.3.1. Konsisten dan teguh dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dalam tindakan;
- 2.3.2. Jujur dalam segala tindakan;
- 2.3.3. Menghindari benturan kepentingan;
- 2.3.4. Berpikiran positif, arif, dan bijaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
- 2.3.5. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2.3.6. Tidak melakukan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme;
- 2.3.7. Tidak melanggar sumpah dan janji pegawai/jabatan;
- 2.3.8. Tidak melakukan perbuatan rekayasa atau manipulasi;
- 2.3.9. dan Tidak menerima pemberian (gratifikasi) dalam bentuk apapun di luar ketentuan.

### 2. Kreatif dan Inovatif

Nilai kreatif dan inovatif bermakna memiliki daya cipta, kemampuan untuk menciptakan hal baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya. Hal baru tersebut dapat berupa gagasan, metode, atau alat. Indikator dari nilai kreatif dan inovatif adalah:

- a. Memiliki pola pikir, cara pandang, dan pendekatan yang variatif terhadap setiap permasalahan, serta mampu menghasilkan karya baru;
- b. Selalu melakukan penyempurnaan dan perbaikan berkala dan berkelanjutan;
- c. Bersikap terbuka dalam menerima ide-ide baru yang konstruktif; Berani

mengambil terobosan dan solusi dalam memecahkan masalah;

- d. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam bekerja secara efektif dan efisien;
- e. Tidak merasa cepat puas dengan hasil yang dicapai; Tidak bersikap tertutup terhadap ide-ide pengembangan; dan
- f. Tidak monoton;

### 3. Inisiatif

Inisiatif adalah kemampuan bertindak melebihi yang dibutuhkan atau yang dituntut dari pekerjaan. Pegawai Kemendikbudristek sewajarnya melakukan sesuatu tanpa menunggu perintah lebih dahulu dengan tujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan hasil pekerjaan, dan menciptakan peluang baru atau menghindari timbulnya masalah. Indikator dari nilai inisiatif adalah:

- a. Responsif melayani kebutuhan pemangku kepentingan;
- b. Bersikap proaktif terhadap kebutuhan organisasi;
- c. Memiliki dorongan untuk mengidentifikasi masalah atau peluang dan mampu mengambil tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah;
- d. Tidak hanya mengerjakan tugas yang diminta oleh atasan; dan
- e. Tidak sekedar mencari suara terbanyak, berlindung dari kegagalan, berargumentasi bahwa apa yang anda lakukan telah disetujui oleh semua anggota tim.

### 4. Pembelajar

Pada nilai pembelajar terkandung ikhtiar untuk selalu berusaha mengembangkan kompetensi dan profesionalisme. Pegawai Kemendikbudristek harus berkeinginan dan berusaha untuk selalu menambah dan memperluas wawasan, pengetahuan, dan pengalaman, serta mampu mengambil hikmah dan pelajaran atas setiap kejadian. Indikator yang menunjukkan nilai pembelajar adalah:

- a. Berkeinginan dan berusaha untuk selalu menambah dan memperluas wawasan, pengetahuan, dan pengalaman;
- b. Mengambil hikmah dari setiap kesalahan dan menjadikannya pelajaran;
- c. Berbagi pengetahuan/pengalaman dengan rekan kerja;
- d. Memanfaatkan waktu dengan baik; Suka mempelajari hal yang baru; dan
- e. Rajin belajar / bertanya / berdiskusi.



## 5. Menjunjung Meritokrasi

Nilai menjunjung meritokrasi berarti menjunjung tinggi keadilan dalam pemberian penghargaan bagi karyawan yang kompeten. Pegawai Kemendikbudristek perlu memiliki pandangan yang memberi peluang kepada orang untuk maju berdasarkan kelayakan dan kecakapannya. Indikator yang mencerminkan nilai ini adalah:

- a. Berkompetisi secara profesional;
- b. Memberikan kesempatan yang setara dalam mengembangkan kompetensi pegawai;
- c. Memberikan penghargaan dan hukuman secara proporsional sesuai kinerja;
- d. Tidak sewenang-wenang;
- e. Tidak mementingkan diri sendiri;
- f. Menduduki jabatan sesuai dengan kompetensinya; dan
- g. Mendapatkan promosi bukan karena kedekatan/primordialisme.

## 6. Terlibat Aktif

Nilai terlibat aktif bermakna senantiasa berpartisipasi dalam setiap kegiatan. Pegawai Kemendikbudristek semestinya suka berusaha mencapai tujuan bersama serta memberikan dorongan, agar pihak lain tergerak untuk menghasilkan karya terbaiknya.

Nilai terlibat aktif terlihat dari indikator:

- a. Terlibat langsung dalam setiap kegiatan untuk mendukung visi dan misi kementerian;
- b. Memberikan dukungan kepada rekan kerja;
- c. Peduli dengan aktivitas lingkungan sekitar (tidak apatis);
- d. dan Tidak bersifat pasif, sekedar menunggu perintah.

## 7. Tanpa Pamrih

Nilai tanpa pamrih memiliki arti bekerja dengan tulus ikhlas dan penuh dedikasi. Pegawai Kemendikbudristek, yang memiliki nilai tanpa pamrih, tidak memiliki maksud yang tersembunyi untuk memenuhi keinginan dan memperoleh keuntungan pribadi. Sebaliknya pegawai Kemendikbudristek memberikan inspirasi, dorongan, dan semangat bagi pihak lain untuk suka berusaha menghasilkan karya terbaiknya sesuai dengan tujuan bersama. Indikator nilai tanpa pamrih adalah:

- a. Penuh komitmen dalam melaksanakan pekerjaan;
- b. Rela membantu pekerjaan rekan kerja lainnya;

- c. Menunjukkan perilaku 4S (senyum, sapa, sopan, dan santun);
- d. Tidak melakukan pekerjaan dengan terpaksa;
- e. dan Tidak berburuk sangka kepada rekan kerja.

Peningkatan internalisasi ketujuh nilai di atas di antara pegawai Kemendikbudristek semakin dirasakan urgensinya untuk memastikan pembangunan pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan Visi Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024 didukung oleh kinerja LLDIKTI Wilayah IX yang prima.

## 2.4. Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan

Tujuan LLDIKTI Wilayah IX mengacu pada Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang terkait dengan pendidikan tinggi yakni:

1. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan bermutu;
2. Peningkatan kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan;
3. Penguatan karakter peserta didik (mahasiswa);
4. Peningkatan produktifitas, riset, inovasi, dan ilmu pengetahuan perguruan tinggi; dan
5. Penguatan sistem tata kelola pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Dengan pertimbangan menjalankan mandat Pasal 17 ayat (3) Undang- Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 Tentang OTK Kemendikbudristek dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi serta Renstra Kemendikbudristek Tahun 2020-2024.

Sebagai upaya untuk mendukung keberhasilan dalam mencapai Sasaran Strategis Kemendikbudristek, LLDIKTI Wilayah IX sebagai Satker Kemdikbudristek yang mengemban tugas melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi, dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya.

Sementara itu, untuk melihat secara lebih konkrit ketercapaian tujuan tersebut perlu ditetapkan ukuran Indikator Kinerja Tujuan tersebut secara kuantitatif.

Indikator Kinerja Tujuan LLDIKTI Wilayah IX merupakan turunan dari Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi LLDIKTI Wilayah IX yang ingin dicapai pada akhir periode sebagaimana dapat dilihat di Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1  
Indikator Kinerja Tujuan LLDIKTI Wilayah IX  
pada tahun 2020-2024

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Target 2024
1	Peningkatan pemerataan layanan pendidikan bermutu	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi	%	45
2	Peningkatan kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan	%	55
		Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan	%	65
		Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja atau tersertifikasi di industri	%	80
		Persentase dosen yang bersertifikat	%	75
		Persentase dosen berkualifikasi S3	%	50
3	Penguatan karakter peserta didik (mahasiswa);	Persentase tingkat pengamalan nilai-nilai Pancasila	%	50
		Persentase tingkat pemahaman konsep Merdeka Belajar	%	75
4	Peningkatan produktifitas, riset, inovasi, dan ilmu pengetahuan perguruan tinggi	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat.	Karya	3750
5	Penguatan sistem tata kelola pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	Opini laporan keuangan	Opini	WTP
		Indeks kepuasan pemangku kepentingan	Indeks	85
		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	90

## 2.5. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dimaksud setiap sasaran diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran. Adapun sasaran kegiatan LLDIKTI Wilayah IX antara lain:

1. Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI);
2. Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi;
3. Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.
4. Meningkatnya tata kelola LLDIKTI;

Sementara itu, dalam rangka mencapai sasaran kegiatan tersebut, telah ditetapkan 7 (tujuh) indikator kinerja sasaran di lingkungan LLDIKTI Wilayah IX yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) LLDIKTI. Adapun 7 (tujuh) rincian Indikator Kinerja Utama (IKU) terlihat pada Tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2  
Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran  
Pada Tahun 2020 - 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2024
1	Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	Persentase layanan LLDIKTI yang tepat waktu.	95
		Persentase PTS dengan peringkat akreditasi unggul, mempunyai lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, atau meningkatkan mutu dengan cara konsolidasi dengan PTS lain.	20
2	Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	Persentase PTS yang memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus; atau</li> <li>b. meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.</li> </ol>	30
		Persentase PTS yang implementasi kebijakan antiintoleransi,	

		antikekerasan seksual, antiperundungan, dan antikorupsi.	100
3	Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di luar kampus dan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra.	40
4	Meningkatnya tata kelola LLDIKTI	Rata-rata prediksi SAKIP Satker minimal BB	A
		Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-KL Satker minimal 80	95



**BAB III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi,  
Kerangka Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi****3. 1. Arah Kebijakan dan Strategi**

Arah kebijakan dan strategi pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi padakurun waktu 2020-2024 dalam rangka mendukung pencapaian 9 (sembilan) Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita Kedua) dan tujuan Kemendikbudristek melalui Kebijakan Merdeka Belajar yang bercita-cita menghadirkan pendidikan bermutu tinggi bagi semua rakyat Indonesia, yang dicirikan oleh angka partisipasi yang tinggi diseluruh jenjang pendidikan, hasil pembelajaran berkualitas, dan mutu pendidikan yang merata baik secara geografis maupun status sosial ekonomi. Selain itu, fokus pembangunan pendidikan dan pemajuan kebudayaan diarahkan pada pematapan budaya dan karakter bangsa melalui perbaikan pada kebijakan, prosedur, dan pendanaan pendidikan serta pengembangan kesadaran akan pentingnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa dan penyerapan nilai baru dari kebudayaan global secara positif dan produktif.

Arah kebijakan dan strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana LLDIKTI Wilayah IX mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam pembangunan pendidikan (strategy focussed-management).

**Arah kebijakan LLDIKTI Wilayah IX dalam menjalankan tugas dan fungsinya diantaranya:**

1. Meningkatkan kualitas wawasan dan pemahaman penyelenggara pendidikan tinggi di Perguruan Tinggi terhadap berbagai kebijakan dan regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah;
2. Meningkatkan ketaat-asasan penyelenggara pendidikan tinggi di PT dalam rangka meminimumkan penyimpangan maupun pelanggaran terhadap regulasi;
3. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian seluruh elemen penyelenggara pendidikan tinggi, dalam upaya peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan di wilayah kerja LLDIKTI Wilayah IX.

**Strategi Kebijakan LLDIKTI Wilayah IX dalam menjalankan tugas dan fungsi diantaranya:**

1. Peningkatan kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan Perguruan Tinggi;
2. Peningkatan kualitas Perguruan Tinggi sehat agar tercipta atmosfer akademik yang kondusif;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia Perguruan Tinggi;
4. Peningkatan jumlah penelitian, publikasi nasional dan internasional bagi tenaga edukatif;
5. Peningkatan kerja sama antar Perguruan Tinggi, dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja;
6. Peningkatan inovasi dan kreatifitas mahasiswa menuju kemandirian; dan
7. Mewujudkan tata kelola yang akuntabel, transparan serta kualitas layanan dan dukungan yang tinggi pada Perguruan Tinggi di lingkungan LLDIKTI Wilayah IX.

### 3.2. Kerangka Regulasi

LLDIKTI Wilayah IX merupakan satuan kerja di lingkungan Kemendikbudristek yang mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh karena itu, LLDIKTI Wilayah IX berkewajiban menerapkan dan melakukan implementasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2005 tentang Perubahan atas PP Nomor 29 Tahun 1997 tentang PNS yang menduduki jabatan rangkap;
5. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Guru dan Dosen;
7. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
8. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
11. Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan dan Pembubaran PTN serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin PT;
12. Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
13. Permendikbudristek Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
14. Permendikbudristek Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain.

15. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2021;

### 3.3. Kerangka Kelembagaan

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, LLDIKTI berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, yang pembinaannya secara teknis dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi dan secara administratif dilakukan oleh Sekretaris Jenderal.

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi yang terdiri atas:

1. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I Medan;
2. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II Palembang;
3. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Jakarta;
4. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV Bandung;
5. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V Yogyakarta;
6. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Semarang;
7. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII Surabaya;
8. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII Denpasar;
9. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX Makassar;
10. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah X Padang;
11. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI Banjarmasin;
12. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XII Ambon;
13. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII Aceh;
14. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIV Papua;
15. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XV NTT;
16. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVI Gorontalo.

Sejak terbitnya Permendikbud Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, LLDIKTI Wilayah IX meliputi wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat.

Struktur organisasi LLDIKTI Wilayah IX mengacu tugas dan fungsi LLDIKTI yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, maka

struktur organisasi LLDIKTI Wilayah IX adalah seperti yang tergambar pada Gambar 3.1 berikut ini:

Gambar 3.1  
Struktur Organisasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi



Seperti yang terlihat pada Gambar 3.1 di atas, dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi LLDIKTI Wilayah IX, Kepala dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi LLDIKTI, didukung bagian umum dan kelompok jabatan fungsional. Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, barang milik negara, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Permendikbudristek Nomor 35 Tahun 2021, bagian umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pengelolaan keuangan;
- c. pengelolaan kepegawaian;
- d. pengelolaan barang milik negara;
- e. pelaksanaan urusan hukum;
- f. pelaksanaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan;



- g. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;
- h. pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan;
- i. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan.

Kelompok Jabatan Fungsional merupakan sejumlah jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Jumlah jabatan fungsional ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berintegritas, profesional, dan kompeten berdasarkan sistem merit sesuai bidang tugasnya sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan LLDIKTI Wilayah IX.

Untuk memastikan ketersediaan SDM tersebut, strategi utama yang dilakukan dalam pengelolaan SDM adalah melalui proses rekrutmen yang transparan untuk mendapatkan *talent* terbaik, peningkatan kompetensi pegawai sesuai kebutuhan organisasi, serta penerapan sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*) dalam rangka meningkatkan kinerja seluruh ASN.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya LLDIKTI Wilayah IX didukung sumber daya manusia yang pada awal tahun 2020 berjumlah sebanyak 988 orang dengan komposisi Dosen PNS yang ditugaskan pada PTS sebanyak 864 orang, Tenaga Kependidikan (Administrasi) sebanyak 85 orang, dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Sebanyak 39 orang.

Kebutuhan ASN tahun 2020-2024 didasarkan pada kebutuhan organisasi sesuai hasil analisis beban kerja di masing-masing jabatan dalam rangka pencapaian tujuan Kemendikbudristek. Disamping itu, proyeksi kebutuhan SDM juga mempertimbangkan jumlah pegawai yang pensiun dari tahun ke tahun, dengan memperhitungkan efektivitas dan efisiensi kerja di masing-masing jabatan. Tabel 3.1 menggambarkan proyeksi kebutuhan SDM LLDIKTI Wilayah IX sampai Tahun 2024.

Tabel 3.1  
Proyeksi Kebutuhan SDM LLDIKTI Wilayah IX  
Tahun 2020-2024

No	Jenis Pegawai	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Dosen PNS DTG		5	10	10	10
2.	Administrasi	-	-	15	-	-
3.	PPNPN	1	1	7	-	-
<b>Total</b>		<b>1</b>	<b>6</b>	<b>32</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

### 3. 4. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi internal LLDIKTI Wilayah IX merupakan upaya sistematis, terpadu, dan komprehensif untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang meliputi aspek kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik di lingkungan LLDIKTI Wilayah IX. Reformasi birokrasi dihadapkan pada upaya mengatasi masalah inefisiensi, inefektivitas, tidak disiplin, tidak patuh pada aturan, belum ada perubahan paradigma (*mindset*), pemerintahan belum akuntabel, transparan, partisipatif, dan kredibel, pelayanan publik belum berkualitas dan pelayanan publik prima (mudah, murah, cepat, dan lebih baik) belum sepenuhnya terbangun secara luas.

Sebagai Satker Kemendikbudristek yang mengemban amanat melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan memperhitungkan capaian kinerja, potensi, dan permasalahan, LLDIKTI Wilayah IX berupaya mewujudkan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang unggul dan berkarakter. Untuk itu, Program Reformasi Birokrasi LLDIKTI Wilayah IX Tahun 2020-2024 diharapkan dapat mencapai SDM yang berkualitas, baik dari aspek jumlah, kompetensi (*hard competencies* dan *soft competencies*), maupun integritas; termasuk pula manajemen serta kinerja SDM yang tinggi. Sumber Daya Manusia aparatur merupakan elemen terpenting bagi LLDIKTI Wilayah IX yang berperan sebagai penggerak utama dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Mengingat begitu pentingnya SDM aparatur, maka manajemen SDM diperlukan untuk mengelolanya secara sistematis, terencana dan terpola agar tujuan yang diinginkan organisasi pada masa sekarang maupun yang akan datang dapat tercapai secara optimal. Oleh karena itu pula dalam reformasi birokrasi, aspek SDM aparatur menjadi aspek penting, sehingga perlu dilakukan penataan secara sistematis. Di samping aspek SDM aparatur, ketercapaian peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih baik, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, peningkatan profesionalisme sumber daya aparatur pemerintah, serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di lingkungan LLDIKTI Wilayah IX juga merupakan hal yang sangat penting.

Selain itu, LLDIKTI Wilayah IX juga terus melanjutkan dan mengoptimalkan

pelaksanaan reformasi birokrasi yang sudah berjalan baik meliputi delapan area perubahan, yakni:

1. Manajemen Perubahan bertujuan mendorong terciptanya budaya kerja positif yang kondusif bagi terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif, dan efisien serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas;
2. Penguatan Pengawasan bertujuan menciptakan penyelenggaraan birokrasi yang bersih dan bebas dari KKN;
3. Penguatan Akuntabilitas Kinerja bertujuan mendorong birokrasi lebih berkinerja dan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan segala sumber yang dipergunakannya;
4. Penguatan Kelembagaan bertujuan mendorong terciptanya budaya/perilaku yang lebih kondusif dalam upaya mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien;
5. Penguatan Tata Laksana bertujuan mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan, sekaligus juga untuk mengubah mental aparatur;
6. Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur bertujuan memperoleh sistem manajemen SDM yang mampu menghasilkan pegawai yang profesional;
7. Penguatan Peraturan Perundang-Undangan bertujuan mendorong penerapan dan implementasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud; dan
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bertujuan mendorong perubahan profesionalisme para penyedia pelayanan serta meningkatkan kualitas pelayanan.

**BAB IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan****4. 1. Target Kinerja 2020 - 2024**

Dalam rangka mewujudkan sasaran LLDIKTI Wilayah IX dan mendukung sasaran strategis Kemendikbudristek serta mendukung tercapainya kebijakan pada level nasional, LLDIKTI Wilayah IX menetapkan empat sasaran yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata yang mencerminkan keberhasilan (*outcome*) dari satu atau beberapa program. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dimaksud setiap sasaran kegiatan dan program diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Kegiatan.

Berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada periode 2020-2024 selanjutnya sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021 maka ditetapkan juga Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk menggambarkan tingkat ketercapaian indikator sasaran strategis tersebut. Secara lebih rinci IKU LLDIKTI Wilayah IX dan target yang akan dicapai pada periode 2020-2024, sebagaimana tercermin pada Lampiran II Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021 sebagai berikut:

Tabel 4.1

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan  
Renstra LLDIKTI Wilayah IX Tahun 2020-2024

Sasaran/ Indikator	Sasaran	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
<b>SK 1</b>	<b>Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)</b>						
IKK 1.1	Persentase layanan LLDIKTI yang tepat waktu	%	60,00	70,00	80,00	90,00	95,00

IKK 1.2	Persentase PTS dengan peringkat akreditasi unggul, mempunyai lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, atau meningkatkan mutu dengan cara konsolidasi dengan PTS lain	%	01,00	05,00	10,00	15,00	20,00
<b>SK 2</b>	<b>Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi</b>						
KK 2.1	Persentase PTS yang memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) <b>mahasiswa</b> S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional	%	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00
IKS 2.2	Persentase PTS yang implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, dan antikorupsi	%	90,00	95,00	100,00	100,00	100,00

<b>SK 3</b>	<b>Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan</b>						
IKK 3.1	Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di luar kampus dan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra	%	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00
<b>SK 4</b>	<b>Meningkatnya Tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)</b>						
IKK 4.1	Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	predikat	BB	BB	BB	BB	A
IKK 4.2	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80	nilai	80	85	88	90	95

### Sasaran Kegiatan (SK 1)

#### Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI):

- **Keunggulan layanan**  
Layanan LLDIKTI yang tepat waktu.
- **Arsitektur Perguruan Tinggi Swasta (PTS)**  
PTS dengan peringkat akreditasi unggul, jumlah PTS dengan lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, atau jumlah PTS yang berkonsolidasi dengan PTS lain.



## Sasaran Kegiatan (SK 2)

### Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi:

#### - Kampus Merdeka

- a. Kebijakan Kampus Merdeka, antara lain paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang mendapatkan paling sedikit 20 (dua puluh) sks dari kegiatan di luar kampus (dengan dosen pembimbing), sesuai dengan Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka. Kegiatan boleh dikombinasikan dan dihitung kumulatif:
  - 1) Magang atau praktek kerja Kegiatan magang di sebuah perusahaan, organisasi nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, ataupun perusahaan rintisan (startup company). Bagi program studi vokasi yang sudah memiliki program magang wajib, tidak dapat dihitung.
  - 2) Proyek di desa Proyek sosial/pengabdian kepada masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lain-lain.
  - 3) Mengajar di sekolah Kegiatan mengajar di sekolah dasar dan menengah selama beberapa bulan. Sekolah dapat berlokasi di kota ataupun daerah terpencil.
  - 4) Pertukaran pelajar Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi, baik luar negeri maupun dalam negeri berdasarkan perjanjian kerja sama yang sudah diadakan antarperguruan tinggi atau pemerintah.
  - 5) Penelitian atau riset Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti.
  - 6) Kegiatan wirausaha Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri, dibuktikan dengan penjelasan/proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai.
  - 7) Studi atau proyek independen Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek yang diinisiasi secara mandiri (untuk mengikuti lomba tingkat internasional yang relevan dengan keilmuannya, proyek teknologi, maupun rekayasa sosial) yang pengerjaannya dapat dilakukan secara mandiri ataupun bersama-sama dengan mahasiswa lain.

8) Proyek kemanusiaan Kegiatan sosial/pengabdian kepada masyarakat yang merupakan program perguruan tinggi atau untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan, baik di dalam maupun luar negeri (seperti penanganan bencana alam, pemberdayaan masyarakat, penyelamatan lingkungan, palang merah, peace corps, dan seterusnya), yang disetujui perguruan tinggi.

b. Kriteria prestasi

Berprestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional.

- **Tiga dosa dan antikorupsi**

PTS yang memiliki kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, dan antikorupsi.

**Sasaran Kegiatan (SK 3)**

**Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan**

- **Link and match PTS**

a. Kriteria 1: dosen berkegiatan tridarma di luar kampus Lebih dari 20% (dua puluh persen) dosen berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir:

1) Syarat pelaporan ke Pimpinan Perguruan Tinggi:

a) kegiatan harus dengan sepengetahuan institusi atau pimpinan perguruan tinggi, misalnya dengan persetujuan kepala program studi;

b) format kegiatan dapat berupa kebijakan cuti meninggalkan tugas akademik dan administratif dalam satu kurun tertentu untuk kepentingan riset atau menulis karya akademik dengan tetap mendapatkan penghasilan dari institusi tempatnya bekerja (sabbatical leave) atau paruh waktu (part time);

c) kegiatan harus disertai kontrak atau surat keputusan di antara perguruan tinggi asal dan organisasi luar kampus; dan

d) dosen dapat diberikan keringanan beban kerja/jumlah sks yang harus

dicapai selama sedang berkegiatan tridarma di luar kampus.

2) Kriteria Perguruan Tinggi:

- a) perguruan tinggi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang setidaknya memiliki program studi yang terdaftar dalam QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject); atau
- b) perguruan tinggi di dalam negeri lainnya.

3) Kriteria Kegiatan Daftar kegiatan dapat mengacu pada rubrik kegiatan beban kerja dosen. Beberapa contoh kegiatan, antara lain:

- a) Pendidikan: menjadi pengajar, pembimbing, penilai mahasiswa, membina kegiatan mahasiswa, mengembangkan program studi atau rencana kuliah, dan seterusnya.
- b) Penelitian: memulai penelitian baru, membantu penelitian dosen di kampus lain, membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan, dan seterusnya.
- c) Pengabdian kepada masyarakat: fasilitasi pembelajaran pengabdian masyarakat, fasilitasi kuliah kerja nyata, memberi latihan kepada masyarakat, dan seterusnya.

4) Kriteria Pengalaman Praktisi

- a) Untuk PTN Akademik dan PTN Vokasi Bekerja sebagai peneliti, konsultan, atau pegawai penuh waktu (full time) atau paruh waktu (part time) di:
  - perusahaan multinasional;
  - perusahaan teknologi global;
  - perusahaan rintisan (startup company) teknologi;
  - organisasi nirlaba kelas dunia;
  - institusi/organisasi multilateral; atau
  - lembaga pemerintah, BUMN/BUMD

b) Untuk PTN Seni Budaya

Sama dengan PTN Akademik dan PTN Vokasi dengan tambahan:

- menjadi pendiri atau pasangan pendiri (co-founder) perusahaan (contoh: membuka sanggar);
- berkreasi independen atau menampilkan karya; atau

- menjadi juri, kurator, dan/atau panitia acara seni budaya tingkat nasional

5) Kriteria prestasi

Berprestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional.

b) Kriteria 2: kerja sama program studi dengan mitra

Lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari program studi S1 dan D4/D3/D2 melaksanakan kerja sama dengan mitra

1) Kriteria Kemitraan

Perjanjian kerja sama yang setidaknya menyatakan komitmen mitra dalam penyerapan lulusan. Dapat diperkuat dengan bentuk kerja sama lainnya seperti:

a) untuk PTN Akademik:

- pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil (output) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran); dan
- menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh. Serta dapat melakukan kegiatan tridarma lainnya, misalnya kemitraan penelitian.

b) untuk PTN Vokasi:

- pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil (output) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran);
- menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh;
- menyediakan kesempatan kerja; dan
- mengisi kegiatan pembelajaran dengan dosen tamu praktisi.

Serta dapat melakukan kegiatan tridarma lainnya, misalnya kemitraan penelitian dan/atau memberikan pelatihan bagi dosen dan instruktur.

c) untuk PTN Seni Budaya:

- pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil (output) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran); dan
- menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh.

Serta dapat melakukan kegiatan tridarma lainnya, misalnya kemitraan penelitian.

- 2) Kriteria mitra:
  - a) perusahaan multinasional;
  - b) perusahaan nasional berstandar tinggi;
  - c) perusahaan teknologi global;
  - d) perusahaan rintisan (startup company) teknologi;
  - e) organisasi nirlaba kelas dunia;
  - f) institusi/organisasi multilateral;
  - g) perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject);
  - h) perguruan tinggi, fakultas, atau program studi dalam bidang yang relevan (untuk PTN Vokasi dan PTN Seni Budaya);
  - i) instansi pemerintah, BUMN dan/atau BUMD;
  - j) rumah sakit; atau UMKM.
  - k)

#### 4. 2. Kerangka Pendanaan

Upaya untuk mencapai tujuan LLDIKTI Wilayah IX dan sasaran- sasaran yang telah ditetapkan, serta mendukung tercapainya tujuan dan sasaran-sasaran strategis Kemendikbudristek, diperlukan dukungan berbagai macam sumber daya, dukungan dan prasarana yang memadai, dukungan regulasi, dan tentunya sumber pendanaan yang cukup. Sehubungan dengan dukungan pendanaan, indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran LLDIKTI Wilayah IX untuk tahun 2020-2024 sebagaimana tertuang pada Tabel

4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2

**Kerangka Pendanaan Rencana Strategis LLDIKTI Wilayah IX**

Dalam ribuan rupiah

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	1.1	Persentase layanan LLDIKTI yang tepat waktu.	246.800.000	275.000.000	315.000.000	345.000.000	375.000.000
		1.2	Persentase PTS dengan peringkat akreditasi unggul, mempunyai lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, atau meningkatkan mutu dengan cara konsolidasi dengan PTS lain.	1.975.000	2.250.000	2.450.000	2.750.000	3.000.000
2	Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	2.1	Persentase PTS yang memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) Mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	785.000	825.000	875.000	925.000	975.000
		2.2	Persentase PTS yang implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, dan antikorupsi.	574.000	650.000	675.000	685.000	750.000
3	Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	3.1	Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di luar kampus dan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra.	1.650.000	1.750.000	1.850.000	1.925.000	1.985.000
4	Meningkatnya tata kelola LLDIKTI	4.1	Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	245.000	350.000	450.000	575.000	585.000
		4.2	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80	500.000	525.000	550.000	575.000	585.000

## Bab V Penutup

Renstra LLDIKTI Wilayah IX ini disusun dalam rangka mewujudkan Renstra Kemendikbud yang bertujuan mewujudkan pembangunan Sumber Daya Manusia yang unggul dan berkarakter yang menjadi fokus Presiden dan Wakil Presiden pada RPJMN. Oleh karena itu, Renstra LLDIKTI Wilayah IX ini disusun untuk membawa perubahan dalam rangka: (1) penekanan fokus pada mutu dan relevansi pendidikan tinggi yang berpusat pada perkembangan peserta didik; (2) pengembangan mutu pendidik dan tenaga kependidikan secara berkesinambungan; dan (3) penguatan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pendidikan tinggi yang berkualitas, termasuk penguatan peran LLDIKTI Wilayah IX sebagai Satker yang memiliki tugas melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk diimplementasi oleh perguruan tinggi yang berada di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat.

Rencana Strategis ini telah menjabarkan tujuan dan sasaran LLDIKTI Wilayah IX beserta visi dan misi Kemendikbudristek dan sasaran nasional dalam rangka mencapai sasaran program Presiden dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Oleh karena itu, Renstra LLDIKTI Wilayah IX menggambarkan secara jelas keterkaitan antara tujuan dan sasaran LLDIKTI Wilayah IX, serta dilengkapi dengan indikator keberhasilannya guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan APBN.

Renstra LLDIKTI Wilayah IX digunakan sebagai pedoman dan arah dalam proses peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat yang hendak dicapai pada periode 2020-2024 baik bagi unit kerja di lingkup LLDIKTI Wilayah IX, ataupun sebagai pedoman bagi perguruan tinggi dalam melaksanakan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.



Selain yang diuraikan di atas, Renstra LLDIKTI Wilayah IX ini diharapkan bisa dipahami serta dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia, khususnya para pemangku kepentingan. Dengan demikian, banyak pihak dapat terlibat aktif secara efektif dan konstruktif dalam kegiatan pembangunan bidang pendidikan tinggi, termasuk memberi kritik, evaluasi, rekomendasi, dan kontribusi nyata. Pelibatan publik secara lebih aktif dan terintegrasi diharapkan mampu meningkatkan hasil pembangunan pendidikan tinggi selama lima tahun mendatang.



Lampiran 1: Matriks Kinerja dan Pendanaan

Kode	Sasaran/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam jutaan rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
<b>S 1</b>	<b>Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)</b>											
IKS 1.1	Persentase layanan LLDIKTI yang tepat waktu	%	60,00	70,00	80,00	90,00	95,00	246.800.	275.000.	315.000.	345.000.	375.000.
IKS 1.2	Persentase PTS dengan peringkat akreditasi unggul, mempunyai lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, atau meningkatkan mutu dengan cara konsolidasi dengan PTS lain	%	01,00	05,00	10,00	15,00	20,00	1.975	2.250	2.450	2.750	3.000.
<b>S 2</b>	<b>Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi</b>											
IKS 2.1	Persentase PTS yang memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional	%	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00	785	825	875	925	975
IKS 2.2	Persentase PTS yang implementasi kebijakan anti intoleransi, anti kekerasan seksual, anti perundungan, dan anti korupsi	%	90,00	95,00	100,00	100,00	100,00	574	650	675	685	750
<b>SK 3</b>	<b>Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan</b>											

KS 3.1	Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di luar kampus dan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra	%	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00	1.650	1.750	1.850	1.925	1.985
<b>SK 4</b>	<b>Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi</b>											
IKK	Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	predikat	BB	BB	BB	BB	A	245	350	450	575	585
IKK	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80	nilai	80	80	85	85	90	500	525	550	575	585



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH IX

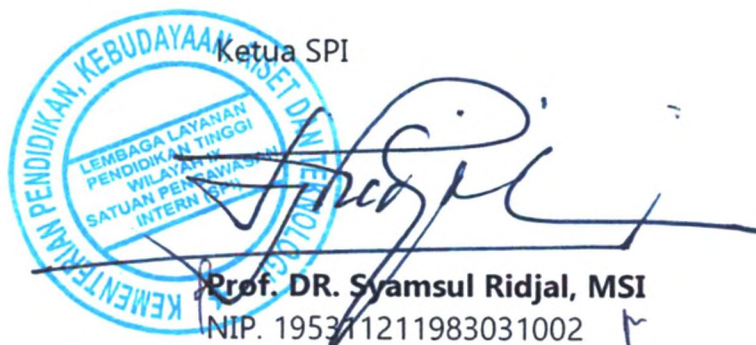
Jalan Bung KM. 9 Tamalanrea Makassar 90245  
Telepon (0411) 586201-586202, Faximile (0411) 586241  
Laman: [www.lldikti9.ristekdikti.go.id](http://www.lldikti9.ristekdikti.go.id)

**BERITA ACARA**

Pada hari ini Senin, tanggal Empat bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami Tim Reviu Renstra LLDIKTI Wilayah IX yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala LLDIKTI Wilayah IX nomor: 4769/LL9/HK.03.01/2022 tanggal 30 Juni 2022 telah melaksanakan Reviu Rencana Strategis LLDIKTI Wilayah IX 2020-2024, sebagai tindak lanjut Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2021, Perubahan SOTK LLDIKTI, IKU LLDIKTI dan penyesuaian Renstra Kemendikbudristek 2020-2024 dengan rincian hasil sebagai berikut:

1. Menambahkan tujuan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX yang merupakan turunan dari sasaran strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia yang mengacu pada Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020/2024
2. Menambahkan strategi kebijakan LLDIKTI Wilayah IX dilihat dari tugas pokok dan fungsi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX yakni melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi
3. Menyesuaikan landasan regulasi dalam menyusun rencana strategis (renstra) Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX
4. Menyesuaikan Kerangka kelembagaan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX sesuai dengan Permendikbudristek Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
5. Menyesuaikan target kinerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX yang akan dicapai pada periode 2022 sampai dengan 2024
6. Melengkapi Indikator Kinerja Tujuan dengan target keberhasilan (target pada akhir periode Renstra pada unit kerja di atasnya)

Demikian pelaksanaan Reviu Renstra 2020-2024 dilaksanakan oleh Tim Reviu Renstra LLDIKTI Wilayah IX







KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH IX

Jalan Bung Kilometer 9 Tamalanrea Makassar 90245  
Telepon: (0411) 586201, 586202, Faximile: (0411) 586241  
Laman : [www.lldikti9.kemdikbud.go.id](http://www.lldikti9.kemdikbud.go.id)

**NOTULA/LAPORAN REVIU RENSTRA**

Nama Rapat : Rapat Reviu/Evaluasi Renstra Tahun 2022  
Hari/Tanggal Rapat : Jumat/Tanggal 1 Juli 2022  
Waktu Rapat : 08.00 – Selesai (Jumat 1 Juli 2022)  
Pimpinan Rapat : Kepala LLDIKTI Wilayah IX

Reviu/Evaluasi Renstra Tahun 2022 dilaksanakan dalam rangka membahas beberapa hal sebagai berikut:

1. Capaian/Tujuan/Sasaran Renstra sampai tahun 2022
2. Kendala, permasalahan dan tindak lanjut

Hasil reviu evaluasi atas poin poin pembahasan diatas adalah sebagai berikut:

**1. Capaian Tujuan/Sasaran Renstra sampai tahun 2022:**

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Target 2021	Capaian 2021
Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	Persentase layanan LLDIKTI yang tepat waktu.	95	70	85
	Persentase PTS dengan peringkat akreditasi unggul, mempunyai lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, atau meningkatkan mutu dengan cara konsolidasi dengan PTS lain.	20	2	4,67
Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	Persentase PTS yang memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	30	15	24,32
	Persentase PTS yang implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, dan antikorupsi	100	95	97,30
Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen	40	25	30,48

	yang berkegiatan tridarma di luar kampus dan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra.			
Meningkatnya tata kelola LLDIKTI	Predikat SAKIP	A	BB	B
	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	95	85	88,31

Seperti yang terlihat pada tabel indikator kinerja sasaran yang mendukung pencapaian tujuan di tahun 2022 sebagian besar dapat tercapai/melebihi target kecuali predikat SAKIP yang belum mencapai target hal ini disebabkan antara lain:

- Adanya perubahan Indikator Kinerja Utama dan Struktur Organisasi dan Tata Kerja LLDIKTI sehingga harus dilakukan revisi RENSTRA untuk memastikan keselarasan rumusan tujuan/sasaran/indikator dengan tugas dan fungsi Unit Kerja.
- Perjanjian Kinerja LLDIKTI Wilayah IX belum dilakukan secara berjenjang sampai kepada PTS yang menjadi target kinerja LLDIKTI Wilayah IX
- Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) belum sepenuhnya mendukung target kinerja pimpinan atau satuan kerja.
- Pengumpulan data kinerja utamanya data kinerja yang bersumber dari PTS belum dapat dimaksimalkan dan dioptimalkan oleh karena belum didukung dengan sistem informasi yang andal.

Program/kegiatan yang dilaksanakan dengan jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 248,423,753,000,-

## 2. Kendala, Permasalahan dan Tindak Lanjut

- Adanya refocusing anggaran sehingga berdampak pada pencapaian target kinerja;
- kegiatan yang mendukung Implementasi MBKM masih relatif rendah karena kurangnya pemahaman terhadap kebijakan MBKM.

Mengacu pada kendala maupun permasalahan yang diidentifikasi pada pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan/sasaran pada Renstra, beberapa tindak lanjut/rencana aksi yang dilakukan untuk meningkatkan pencapaian tujuan/sasaran adalah sebagai berikut:

- Melakukan revisi anggaran dengan membuat program/kegiatan prioritas yang mendukung sasaran strategis dan IKU LLDIKTI untuk pencapaian target kinerja/renstra;
- Melaksanakan sosialisasi/pendampingan terkait kebijakan MBKM;
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap persiapan Perguruan Tinggi dalam proses akreditasi Unggul dan implementasi MBKM.

Demikianlah pelaksanaan Reviu/Evaluasi Renstra Tahun 2022 dilakukan.



Kepala,

Drs. Andi Lukman, M.Si  
NIP. 196708171993031001